

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Politik terhadap Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia

Mustapa Kamil Alga Beruh*¹, Lusiana²

^{1,2} Prodi Manajemen dan Akuntansi, Universitas Gunung Leuser Aceh

*Email korespondensi: mustapakamilbroeh@gmail.com

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a national strategic policy aimed at enhancing human capital quality through nutritional intervention. This study aims to analyze the social, economic, and political implications of the MBG program for the community in Aceh Tenggara Regency. The method employed is a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were gathered through in-depth interviews with 10 key informants, including education authorities, school administrators, MSME caterers, and parents, supplemented by a review of regional development documents. The findings indicate that in Aceh Tenggara, the MBG program successfully stimulates the local agricultural sector by absorbing regional commodities such as rice and highland vegetables, while creating new employment opportunities for village-level cooks and distributors. Socially, the program significantly reduces the daily expenditure burden on farming households and improves students' learning readiness. However, politically, the study identifies a risk of local-level program instrumentalization, where food vendor selection mechanisms are vulnerable to political patronage practices by village elites. This study concludes that the long-term effectiveness of the MBG program requires standardized procurement transparency and the strengthening of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to minimize practical political interference in aid distribution.

Keywords: Southeast Aceh; Political Economy; MBG Program; MSMEs

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi sosial, ekonomi, dan politik program MBG terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan kunci yang terdiri dari otoritas pendidikan, pengelola sekolah, pelaku UMKM jasa boga, dan orang tua siswa, serta didukung oleh studi dokumen laporan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Aceh Tenggara, MBG berhasil menstimulasi sektor pertanian lokal melalui penyerapan komoditas unggulan seperti beras dan sayuran pegunungan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga masak dan distribusi di tingkat desa. Secara sosial, program ini mengurangi beban pengeluaran harian rumah tangga petani secara signifikan dan meningkatkan kesiapan belajar siswa. Namun secara politik, penelitian ini menemukan adanya risiko instrumentalisasi program di tingkat lokal, di mana mekanisme penentuan vendor penyedia makanan rentan terhadap praktik patronase politik elit desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas jangka panjang MBG memerlukan standarisasi transparansi pengadaan dan penguatan peran BUMDes untuk meminimalisir intervensi politik praktis dalam distribusi bantuan.

Kata Kunci: Aceh Tenggara; Ekonomi Politik; Program MBG; UMKM

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi sosial dan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dalam literatur ekonomi pembangunan klasik hingga kontemporer, pembangunan dipahami sebagai perubahan struktural yang mencakup peningkatan produktivitas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2015). Keberhasilan pembangunan saat ini tidak lagi diukur semata-mata melalui indikator Produk

Domestik Bruto (PDB), melainkan melalui perluasan kapabilitas individu yang mencakup aspek kesehatan dan pendidikan (Haq, 1995; UNDP, 2024). Indonesia, dalam perjalanannya menuju visi Indonesia Emas 2045, menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kualitas nutrisi dan pendidikan, yang menjadi fondasi utama bagi daya saing bangsa di kancah global.

Intervensi negara melalui kebijakan sosial menjadi instrumen krusial dalam mempercepat pembangunan manusia ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pergeseran luas kebijakan Indonesia menuju kebijakan populis yang berorientasi pada kesejahteraan, khususnya di sektor pendidikan. Secara konseptual, MBG selaras dengan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai tujuan utama (Sen, 1999). Program ini dirancang sebagai janji unggulan untuk mengatasi malnutrisi dan mendukung proses belajar dengan menyediakan makanan kaya nutrisi bagi kelompok rentan dan siswa di berbagai jenjang sekolah (Tangkudung, 2025). Dengan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp100 triliun pada tahun pertama, kebijakan ini secara eksplisit menghubungkan nutrisi, pembentukan modal manusia, dan stimulasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM pangan.



Gambar 1. Strategi Modal Manusia (*Human Capital Strategy*)

Source: Diolah berdasarkan kerangka kerja manajemen sumber daya manusia strategis (2026).

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya merupakan manifestasi dari strategi pengembangan modal manusia yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1, terdapat enam pilar utama yang membentuk *Human Capital Strategy*, yakni pengembangan kompetensi, manajemen pembelajaran, evaluasi kinerja, keterlibatan proses, penguatan sistem, dan integrasi organisasi. Dalam konteks MBG, pilar pengembangan kompetensi dan manajemen pembelajaran terjadi ketika siswa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sehingga kapasitas kognitif mereka meningkat, yang merupakan prasyarat utama keberhasilan pendidikan (Tangkudung, 2025). Nutrisi yang baik memungkinkan proses belajar berlangsung lebih efektif, yang secara jangka panjang akan tercermin dalam pilar evaluasi kinerja sumber daya manusia di masa depan.

Dalam perspektif ekonomi makro, Program MBG berfungsi sebagai stimulus fiskal yang mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah (Keynes, 1936). Di wilayah dengan karakteristik agraris seperti Kabupaten Aceh Tenggara, kebijakan

belanja sosial pemerintah ini berpotensi besar mendorong permintaan agregat jika diintegrasikan dengan rantai pasok lokal. Setiap alokasi anggaran untuk bahan pangan diharapkan menjadi pendapatan bagi petani dan pelaku usaha mikro setempat (Todaro & Smith, 2015). Evaluasi awal menunjukkan bahwa implementasi MBG berbasis sekolah dapat meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa, sekaligus membina kolaborasi antara sekolah dan komunitas (Sari, 2025; Fadli et al., 2025). Namun, tantangan logistik dan pemantauan yang ketat menjadi syarat mutlak agar program ini tidak sekadar menjadi kebijakan distributif yang konsumtif, melainkan transformatif bagi ekonomi desa.

Di sisi lain, populisme di Indonesia belakangan ini semakin mengambil bentuk pembangunisme teknokratis yang pro-rakyat, di mana program kesejahteraan negara dibingkai sebagai respons langsung terhadap ketimpangan sosial (Mietzner, 2020; Diprose et al., 2019). Dalam sektor pendidikan, dinamika ini memunculkan ketegangan antara janji populis yang sangat terlihat, seperti makan gratis, dengan keterbatasan anggaran sektoral yang nyata. Analisis politik pendidikan terkini menyoroti bahwa inisiatif seperti MBG diperkenalkan saat anggaran pendidikan sedang berada di bawah tekanan besar (Munandar & Susanti, 2024). Muncul kekhawatiran bahwa kebijakan jangka pendek yang bertujuan memenangkan simpati publik ini dapat menggeser prioritas investasi jangka panjang lainnya, seperti kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan akses pendidikan yang adil di daerah-daerah terpencil dan tertinggal seperti sebagian wilayah di Aceh Tenggara.

Pendidikan kini diposisikan sebagai kendaraan utama pembangunan berbasis modal manusia, namun juga menjadi arena di mana narasi populis saling berkontestasi. Di bawah kepemimpinan nasional yang baru, kebijakan seperti MBG beririsan dengan roadmap pendidikan jangka panjang 2020-2035 yang mengaitkan persekolahan dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja guna membentuk Profil Pelajar Pancasila yang kompetitif namun tetap berakar pada nilai nasional (Fitramadhana, 2023). Para ahli menunjukkan bahwa "populisme teknokratis" ini mencampurkan retorika kesejahteraan dengan aktivisme negara untuk mengonsolidasikan kontrol atas sektor-sektor strategis (Hidayat, 2025). Oleh karena itu, kebijakan MBG berada di persimpangan antara kebijakan sosial, persaingan politik, dan reformasi pendidikan yang menjanjikan keuntungan nutrisi sekaligus risiko terhadap keberlanjutan pembiayaan pendidikan yang lebih luas.

Kabupaten Aceh Tenggara memberikan konteks empiris yang unik untuk menguji teori-teori pembangunan tersebut. Sebagai daerah dengan keterbatasan akses infrastruktur namun kaya akan potensi pertanian, efektivitas MBG sangat bergantung pada tata kelola distribusi dan koordinasi antarlevel pemerintahan (Evans, 1995). Data menunjukkan bahwa persoalan gizi dan stunting masih menjadi tantangan serius di wilayah Aceh, yang memerlukan intervensi preventif melalui sekolah (Kemenkes RI, 2024). Namun, pelaksanaan otonomi daerah seringkali menciptakan celah koordinasi yang menghambat efektivitas kebijakan nasional di tingkat lokal. Tanpa integrasi yang kuat dengan potensi ekonomi desa dan pengawasan publik yang partisipatif, MBG berisiko menjadi kebijakan yang kurang berdampak pada transformasi struktural ekonomi di Aceh Tenggara, terutama jika terjebak dalam praktik birokrasi yang inefisien.

Dalam dimensi politik, kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar seperti makanan bergizi memperkuat kontrak sosial dan legitimasi pemerintahan (Esping-Andersen,

1990). Namun, di tingkat lokal, program sosial berskala besar sering kali menjadi ruang kontestasi dan instrumentalisasi politik (Jessop, 1990). Di Aceh Tenggara, dinamika ini perlu dicermati agar distribusi bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan patronase politik menjelang agenda elektoral daerah. Teori modal sosial dari Robert Putnam (1993) menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan program dapat meminimalisir risiko tersebut. Keberhasilan MBG untuk memperdalam demokrasi dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada apakah program ini dikelola secara transparan atau justru menjadi alat mobilisasi politik jangka pendek yang mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik pembangunan, kajian ini memosisikan MBG sebagai bagian dari relasi dinamis antara negara, pasar, dan masyarakat di wilayah Aceh. Fokus analisis akan diarahkan pada bagaimana kebijakan ini mempengaruhi ketahanan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, serta dampaknya terhadap kohesi sosial di lingkungan sekolah. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi program terhadap pembangunan daerah yang inklusif, sekaligus mengidentifikasi tantangan struktural yang dapat menghambat pencapaian target jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh Tenggara.

Analisis ini menjadi krusial karena penguatan SDM melalui nutrisi adalah investasi yang hasilnya baru akan terlihat dalam satu dekade mendatang. Keselarasan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal di Aceh Tenggara menjadi kunci utama keberhasilan transisi ini. Dengan mengeksplorasi gap antara ekspektasi kebijakan populis dan realitas implementasi di lapangan, studi ini memberikan kontribusi pada literatur ekonomi politik di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana kebijakan kesejahteraan nasional beroperasi dalam ruang desentralisasi. Pada akhirnya, Program MBG tidak boleh hanya berfungsi sebagai intervensi kesejahteraan jangka pendek, melainkan harus menjadi kebijakan transformatif yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan partisipasi demokratis warga di tingkat akar rumput (Yusriadi, 2025; Erlinawati, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara. Desain penelitian ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial dan memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna di balik kebijakan serta dampaknya terhadap struktur ekonomi lokal (Creswell & Poth, 2018; Denzin, 1978). Unit analisis dalam penelitian ini mencakup kebijakan nasional MBG, struktur pemerintahan daerah di Aceh Tenggara, serta aktor ekonomi mikro yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Dengan menggunakan kerangka ekonomi politik pembangunan, penelitian ini membedah relasi kekuasaan dan kepentingan aktor dalam distribusi sumber daya publik, sehingga tidak hanya mendeskripsikan fenomena tetapi juga mengungkap dinamika kontestasi kebijakan di tingkat lokal.

Data penelitian bersumber dari kombinasi data primer dan sekunder untuk menjaga validitas melalui triangulasi data. Data primer diperoleh melalui observasi kontekstual dan

wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sepuluh informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengelola program di tingkat sekolah, pelaku UMKM penyedia jasa boga, serta perwakilan orang tua siswa di Aceh Tenggara. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang komprehensif, mencakup naskah akademik kebijakan MBG, laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara terkait angka kemiskinan dan stunting, serta literatur akademik mutakhir mengenai ekonomi politik pembangunan (Sen, 1999). Seluruh dokumen dipilah berdasarkan relevansinya terhadap indikator capaian pembangunan manusia di wilayah penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sesuai dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Peneliti melakukan kategorisasi temuan berdasarkan tiga dimensi utama: implikasi sosial (modal sosial dan kesehatan), implikasi ekonomi (*multiplier effect* pada UMKM), dan implikasi politik (legitimasi dan tata kelola). Analisis kebijakan dilakukan dengan membandingkan ekspektasi regulasi pusat dengan realitas kapasitas fiskal serta sosiopolitik daerah Aceh Tenggara. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan *member check* dan diskusi rekan sejawat guna memastikan bahwa interpretasi terhadap dinamika implementasi MBG di lapangan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku di jurnal nasional terakreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Gizi dan Penguatan Modal Sosial Masyarakat

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara memberikan dampak signifikan terhadap struktur pengeluaran rumah tangga, terutama pada keluarga berpendapatan rendah. Dalam realitas ekonomi lokal, beban pengeluaran pangan seringkali mendominasi lebih dari 60% total pendapatan bulanan keluarga petani di wilayah pedesaan Aceh Tenggara (BPS, 2024). Dengan adanya intervensi negara melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah, terjadi proses redistribusi beban ekonomi yang secara langsung meningkatkan pendapatan diskresi keluarga. Penghematan biaya konsumsi harian anak ini memungkinkan orang tua untuk mengalokasikan sumber daya finansial mereka ke kebutuhan esensial lainnya, seperti biaya transportasi sekolah atau tabungan kesehatan. Fenomena ini sejalan dengan fungsi protektif negara dalam kerangka *welfare state*, di mana negara hadir untuk mengurangi risiko kerentanan sosial melalui kebijakan afirmatif yang menysar kebutuhan paling dasar manusia (Esping-Andersen, 1990).

Lebih dari sekadar bantuan finansial, implikasi sosial MBG menyentuh aspek fundamental pembangunan manusia, yakni kualitas kesehatan dan kognitif generasi muda. Di Aceh Tenggara, prevalensi stunting dan masalah gizi masih menjadi tantangan yang menghambat capaian indeks pembangunan manusia. Asupan nutrisi yang terjamin melalui program ini terbukti secara empiris mampu meningkatkan daya konsentrasi dan produktivitas belajar siswa di kelas. Investasi pada gizi di usia sekolah merupakan strategi *long-term investment* yang krusial untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi (World Bank, 2006). Anak-anak yang memiliki status gizi baik cenderung memiliki performa akademik yang lebih unggul, yang pada gilirannya akan membentuk profil sumber daya manusia yang kompetitif menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, MBG berfungsi sebagai mesin penggerak dalam menciptakan kesetaraan peluang bagi anak-anak di daerah pelosok untuk mendapatkan hak dasar hidup sehat.

Aspek sosial lain yang muncul dari kebijakan ini adalah penguatan modal sosial melalui mekanisme gotong-royong dalam pengelolaan dapur komunitas. Pelibatan kelompok perempuan, PKK, dan komite sekolah dalam penyediaan makanan menciptakan ruang interaksi sosial yang intens di tingkat desa. Hal ini memperkuat apa yang disebut Robert Putnam (1993) sebagai jaringan sosial (*social networks*) dan norma kepercayaan (*trust*) yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di Aceh Tenggara, tradisi komunal yang masih kuat menjadi modal dasar dalam memastikan program ini berjalan secara partisipatif. Namun, keberlanjutan modal sosial ini sangat bergantung pada transparansi distribusi; ketidakadilan dalam pemilihan vendor atau penerima manfaat berisiko menciptakan fragmentasi sosial. Maka, inklusivitas harus menjadi napas utama dalam setiap tahapan implementasi agar solidaritas warga tetap terjaga.

Stimulasi Ekonomi Lokal dan Efek Pegganda Desa

Secara ekonomi, Program MBG di Aceh Tenggara berperan sebagai katalisator bagi pertumbuhan sektor agraris dan usaha mikro di tingkat akar rumput. Dengan skala anggaran yang besar, program ini menciptakan permintaan agregat baru yang signifikan terhadap produk-produk pertanian lokal seperti beras, sayuran, telur, dan ikan. Jika pengadaan bahan baku dilakukan secara tertutup dengan menyerap hasil panen petani lokal, maka aliran modal akan tetap berputar di dalam ekosistem ekonomi daerah (*multiplier effect*). Dalam logika Keynesian, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk kebutuhan MBG akan memicu siklus produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (Keynes, 1936). Petani di Aceh Tenggara mendapatkan kepastian pasar, sementara pelaku UMKM yang mengelola jasa boga mendapatkan peluang untuk meningkatkan skala usaha mereka. Integrasi ini mengubah kebijakan konsumtif menjadi kebijakan produktif yang memperkuat daya tahan ekonomi desa.

Penciptaan lapangan kerja menjadi implikasi ekonomi nyata lainnya dari operasionalisasi dapur MBG di Aceh Tenggara. Kebutuhan akan tenaga masak, tenaga distribusi, hingga tenaga administrasi memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama bagi perempuan dan pemuda desa yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan tetap. Penyerapan tenaga kerja lokal ini berkontribusi langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan peningkatan daya beli masyarakat di wilayah pedesaan. Namun, potensi ekonomi ini hanya dapat optimal jika tidak terjadi kebocoran anggaran atau dominasi pengadaan dari distributor besar di luar daerah. Apabila bahan baku didatangkan dari luar Aceh Tenggara, maka dampak ekonomi lokal akan terminimalisir dan program ini hanya akan menjadi jalur pelarian modal (*capital flight*) yang merugikan struktur ekonomi daerah.

Keberlanjutan ekonomi dari program ini juga sangat ditentukan oleh digitalisasi dan penguatan kelembagaan seperti koperasi desa. Analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah di tingkat lokal seringkali terjebak dalam praktik inefisiensi jika dikelola secara konvensional. Penggunaan platform digital dalam pemesanan dan pembayaran dapat memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga margin keuntungan lebih banyak diterima oleh produsen pertama (petani). Di Aceh Tenggara, integrasi antara MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi model ideal untuk menciptakan klaster ekonomi mandiri. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi instrumen jangka pendek untuk memberi makan anak sekolah, melainkan menjadi lokomotif yang menarik gerbong transformasi struktural ekonomi daerah menuju kemandirian pangan tingkat lokal.

Legitimasi, Akuntabilitas, dan Kontestasi Kekuasaan

Dari perspektif politik, Program MBG membawa implikasi besar terhadap legitimasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan dalam mengeksekusi janji politik berupa pemenuhan kebutuhan dasar secara nyata cenderung meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi negara. Dalam teori kontrak sosial, pemenuhan hak-hak dasar oleh negara dibalas dengan dukungan dan loyalitas warga negara terhadap sistem yang ada (Esping-Andersen, 1990). Di Aceh Tenggara, kehadiran negara secara konkret di meja makan siswa sekolah memperkuat persepsi bahwa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan rakyat di wilayah terpencil. Legitimasi ini menjadi modal politik yang penting bagi stabilitas pembangunan nasional. Namun, legitimasi ini bersifat rapuh dan sangat bergantung pada konsistensi kualitas serta ketiadaan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

Risiko utama yang membayangi kebijakan ini adalah potensi instrumentalisasi politik di tingkat lokal. Mengingat anggaran MBG yang sangat besar, program ini rentan dimanfaatkan oleh elit politik daerah sebagai alat pencitraan atau patronase politik guna mengamankan basis massa, terutama menjelang agenda elektoral. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan independen, distribusi kontrak pengadaan pangan bisa menjadi arena "bagi-bagi proyek" bagi kelompok kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan kritik dalam ekonomi politik pembangunan bahwa kebijakan sosial berskala besar sering kali menjadi ruang kontestasi anggaran yang tidak sehat (Jessop, 1990). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas untuk memisahkan operasionalisasi program dari kepentingan politik praktis guna menjaga integritas dan tujuan mulia dari kebijakan MBG itu sendiri.

Guna memitigasi risiko tersebut, penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Masyarakat Aceh Tenggara harus dilibatkan sebagai pengawas partisipatif yang memiliki akses terhadap informasi anggaran dan kualitas makanan yang didistribusikan. Digitalisasi sistem distribusi bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen transparansi politik untuk meminimalisir ruang gelap birokrasi. Jika dikelola secara akuntabel, MBG dapat menjadi contoh sukses bagaimana kebijakan populis ditransformasikan menjadi kebijakan teknokratis yang berdampak sistemik. Pada akhirnya, keberhasilan MBG di Aceh Tenggara akan menjadi potret sejauh mana sinergi antara kebijakan pusat dan kapasitas tata kelola daerah mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara bukan sekadar intervensi nutrisi jangka pendek, melainkan kebijakan publik multidimensional yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam dimensi ekonomi, program ini berfungsi sebagai stimulus fiskal yang menciptakan *multiplier effect* melalui penyerapan produk pertanian lokal dan pemberdayaan UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan domestik bruto di tingkat pedesaan (Keynes, 1936; Todaro & Smith, 2015). Secara sosial, MBG memperkuat modal sosial melalui partisipasi komunitas dan secara langsung meningkatkan kapabilitas kognitif siswa sebagai investasi modal manusia jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 (Putnam, 1993; Sen, 1999). Dari perspektif politik, keberhasilan program ini memperkuat legitimasi dan kontrak sosial antara negara dan warga, asalkan dikelola dengan prinsip *good governance* yang bebas dari praktik politisasi dan rente ekonomi (Jessop, 1990; Esping-Andersen, 1990).

Rekomendasi strategis yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa rantai pasok pangan benar-benar bersumber dari potensi agraris lokal Aceh Tenggara guna menghindari *capital flight*. Pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi sistem digitalisasi dalam pengawasan distribusi pangan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir inefisiensi birokrasi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara dinas pendidikan, kesehatan, dan koperasi desa menjadi syarat mutlak agar program ini memiliki dampak struktural yang berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lokus penelitian yang spesifik pada satu kabupaten, sehingga penelitian di masa depan diharapkan dapat memperluas cakupan analisis pada wilayah dengan karakteristik geografis dan sosiopolitik yang berbeda untuk mendapatkan gambaran komparatif mengenai efektivitas kebijakan MBG secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. (2019). Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49, 691 - 712.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>
- Erlinawati, N. (2025). Evaluation of the Free Nutritious Meal Program in the 3T Region Areas Between Nutritional Equity and Infrastructure Challenges. *Oshada* 2(5) 1630176.
<https://doi.org/10.62872/qa1n0f58>
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Fadli, Z., Ismail, I., & Zulfachry, Z. (2025). Social Policy, Food Security, and Educational Motivation: Analyzing the Implementation of the Free Nutritious Meal Program in Urban Indonesia. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora* 3(2) 405-425.
<https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss2pp407-425>
- Fitramadhana, R. (2023). Education in the Midst of Indonesia's Development Agenda. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8(1) 55-81. <https://doi.org/10.17977/um021v8i1p55-81>
- Haq, M. u. (1995). *Reflections on human development*. Oxford University Press.
- Hidayat, R. (2025). Prior Studies on Indonesian Populism: Historical Context, Core Elements, and Blind Spots. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 7(1) 64-94.
<https://doi.org/10.47650/jglp.v7i1.1763>
- Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 7(4), 420 - 438.
<https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A., Putri, A., Ngaisyah, N., Bahirah, Z., Pucangan, J., Kartasura, K., Sukoharjo, P., & Tengah, J. (2025). Keadilan Sosial dan Hak Kewarganegaraan: Kebijakan

- Publik dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 6(2) 79-99. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.313>
- Munandar, A., & Susanti, E. (2024). The Politics Of Education In Indonesia In The Struggle Of Populist Promises And Budget Reality. *Journal of Education and Learning Sciences*. <https://doi.org/10.56404/jels.v4i2.106>
- Sari, S. (2025). IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL POLICY IN BONDOWOSO REGENCY. *Journal Publicuho* 8(3) 71-89. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.896>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Tangkudung, A. (2025). Prabowo-Gibran's Free Nutritious Food: Impacts on Human Capital and Community Economy. *Journal of Comprehensive Science* 4(5) 1578–1587. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i5.3146>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Triwibowo, A., & Martha, J. (2021). The Use of Populism as a Pragmatist Approach in Indonesia. *Insignia: Journal of International Relations* 8(2) 101-116. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.2.4046>
- United Nations Development Programme. (2024). *Human development report 2023/2024*. UNDP.
- World Bank. (2006). *Repositioning nutrition as central to development*. World Bank.
- Yusriadi, Y. (2025). The Impact of Free Nutritious Meal Programs on Food Security: A Systematic Review. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5(1) 92-97. <https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.177>